

Analisis Bibliometrik Tren Penelitian Digital Governance



Author:

Ghazi Al-Ghifari¹, Allisa Akhidatul Idza^{2*}

Affiliation:

Universitas Muhammadiyah Bandung, Jalan Soekarno-Hatta No. 752, Cipadung Kidul, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung, Indonesia¹

PT. Tatalogam Lestari, Jl. Mulawarman No. 11, Manggar, Indonesia²

e-Mail: ghaziputra01@gmail.com¹, allisaidza00@gmail.com²

*Correspondence Author

Received, 11 Desember 2025

Revised, 29 Desember 2025

Accepted, 29 Desember 2025

Available Online, 31 Desember 2025

Abstrak

Publikasi *Digital governance* telah banyak dilakukan secara implementatif, tetapi masih minim penelitian yang menyajikan pemetaan sistematis, tren penelitian, dan hubungan antar-topik melalui pendekatan bibliometrik untuk memahami perkembangan ilmiah di bidang ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tren penelitian "*digital governance*". Metode penelitian adalah analisis bibliometrik dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Sumber database akademik adalah dari Scopus, dan jumlah artikel yang digunakan dalam penelitian ini sejumlah 247 dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tren penelitian mengalami peningkatan jumlah publikasi selama periode tahun 2020 s.d. 2024, dengan publikasi terbanyak pada tahun 2024, yaitu sejumlah 117 artikel. Apabila dilihat dari visualisasi *co-authorship*, maka penulis terbanyak yang mempublikasikan *digital governance* berasal dari negara China, sedangkan penulis dari negara Indonesia masih minim memberikan kontribusi penelitian. Secara *occurrence*, terdapat pergeseran topik penelitian dari tata kelola digital ke arah isu-isu baru yang mengaitkan *digital governance* dengan pengelolaan sumber daya dan ekonomi publik. Kesimpulannya, tren penelitian "*digital governance*" memberikan peluang penelitian masa depan untuk mengeksplorasi hubungan antara tata kelola digital dan isu-isu multidisipliner yang mulai muncul, seperti pengelolaan sumber daya, keberlanjutan, serta dinamika ekonomi digital yang terus berkembang. Penelitian ini berkontribusi sebagai dasar konseptual dan empiris bagi pengembangan studi dan kebijakan tata kelola digital di masa depan.

Kata Kunci: *Digital governance*, Analisis Bibliometrik, Digitalisasi Pelayanan Publik.

Abstract

Digital governance publications have been widely implemented, but there is still a lack of research that presents systematic mapping, research trends, and inter-topic relationships through a bibliometric approach to understand scientific developments in this field. The purpose of this study is to analyze research trends in "digital governance." The research method is bibliometric analysis with a descriptive quantitative approach. The academic database source is Scopus, and the number of articles used in this study is 247 documents. The results show that research trends in digital governance have increased in terms of the number of publications over the last five years, with the highest number of publications in 2024, namely 117 articles. When viewed from the co-authorship visualization, the authors who published the most on digital governance came from China, while authors from Indonesia still contributed minimally to the research. In terms of occurrence, there has been a shift in research topics from digital governance towards new issues that link digital governance with resource management and the public economy. In conclusion, the research trend of "digital governance" provides future research opportunities to explore the relationship between digital governance and emerging multidisciplinary issues, such as resource management, sustainability, and the ever-evolving dynamics of the digital economy. This research contributes as a conceptual and empirical basis for future digital governance development and policy studies.

Keywords: *Digital governance, Bibliometric Analysis, Digitalization of Public Services.*

1. Pendahuluan

Digital governance berperan dalam mengatur proses organisasi dengan meningkatkan pengendalian tugas, mengotomatisasi pembagian pekerjaan, menyesuaikan insentif secara dinamis, serta menciptakan transparansi transaksi yang diperlukan untuk membangun kepercayaan (Hanisch dkk., 2023). *Digital governance* terselenggara melalui pemanfaatan teknologi informasi, komunikasi, dan konektivitas (Bharadwaj dkk., 2013).

Penerapan *digital governance* di Indonesia didukung oleh berbagai kebijakan, yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan. Diantaranya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan penerapan *smart city* di berbagai daerah di Indonesia. Disamping itu, dukungan dari berbagai platform pun diwujudkan melalui adanya sistem perizinan berbasis *Online Single Submission*, pemerintahan terbuka (*open government*), hingga adanya Mal

Pelayanan Publik (MPP). Hal tersebut sejalan dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang mengamanatkan inovasi daerah.

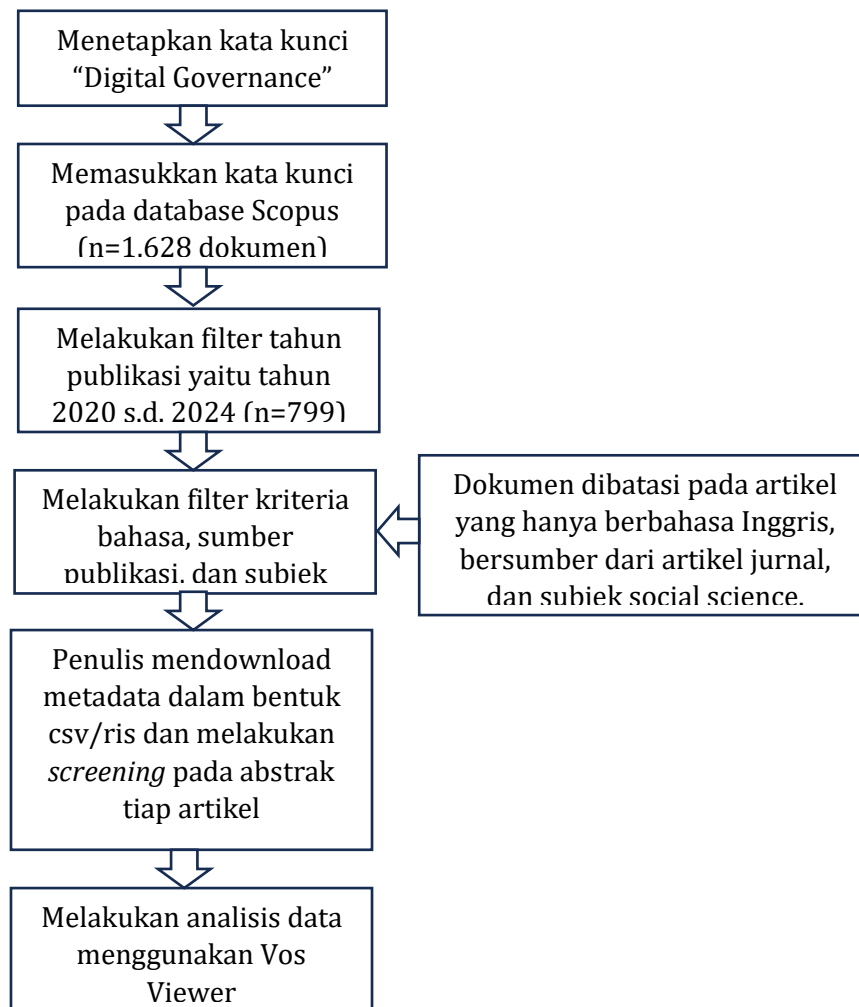
Namun demikian, penerapan *digital governance* di Indonesia pun masih menghadapi beberapa permasalahan. Sebagaimana disebutkan oleh Setyawati & Fitriati (2023) bahwa *digital governance* pada aspek keterbukaan informasi menghadapi persoalan kebijakan digital. Senada dengan hal tersebut, Wagola dkk. (2023) juga menyampaikan bahwa implementasi *digital governance* di Indonesia terhambat regulasi, infrastruktur, kompetensi, dan budaya birokrasi. Disamping kesemua hambatan tersebut, Aminah & Saksono (2021) pun menambahkan hambatan lainnya dari faktor kepemimpinan. Tantangan lainnya yang masih dihadapi adalah, berkaitan dengan kesiapan dan literasi masyarakat (Kennedy dkk., 2024). Sementara itu, hambatan penerapan *digital governance* pun muncul dari aspek internal organisasi pemerintahan, diantaranya terbatasnya sumber daya manusia yang memadai, dan lemahnya infrastruktur internet (Riswati, 2021). Adanya hambatan terkait infrastruktur TIK, pengaruh kepemimpinan, dan persoalan lingkungan dan budaya kerja pun disinggung oleh Kencono dkk. (2024).

Studi sebelumnya yang mengkaji *digital governance* cenderung merupakan implementatif di lapangan. Namun, masih minim penelitian bibliometrik *digital governance* dilakukan. Sementara itu, pada penelitian bibliometrik diharapkan dapat melakukan pemetaan terkait tren penelitian dari *digital governance* yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun tersebut. Oleh karena itu, perbedaan penelitian ini dengan berbagai penelitian terdahulu terletak pada metode penelitian yang digunakan. Penelitian bibliometrik terkait *digital governance* ini menawarkan pendekatan yang sistematis untuk memetakan literatur, menganalisis kata kunci, dan mengidentifikasi tren serta kesenjangan penelitian. Pesatnya transformasi digital pemerintahan menuntut pemetaan ilmiah yang sistematis atas perkembangan riset digital governance agar tidak terjadi fragmentasi pengetahuan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi sebagai dasar penguatan agenda riset dan kebijakan publik yang berbasis data. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tren penelitian *digital governance* selama lima tahun terakhir.

Adapun pertanyaan penelitian ini adalah: 1) bagaimana tren penelitian *digital governance*? 2) bagaimana peta hubungan antar penulis berdasarkan *co-authorship*; 3) peta hubungan tema pada *co-occurrence*.

2. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode analisis bibliometrik dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Penulis melakukan pemetaan tren penelitian terkait “*digital governance*” selama periode tahun 2020 s.d. 2024. Analisis bibliometrik digunakan untuk menggambarkan *overview* topik tertentu dan memproyeksikan peluang penelitian di masa depan (Khan dkk., 2022).



Sumber: Penulis (2025)

Gambar 1. Alur Seleksi Literatur

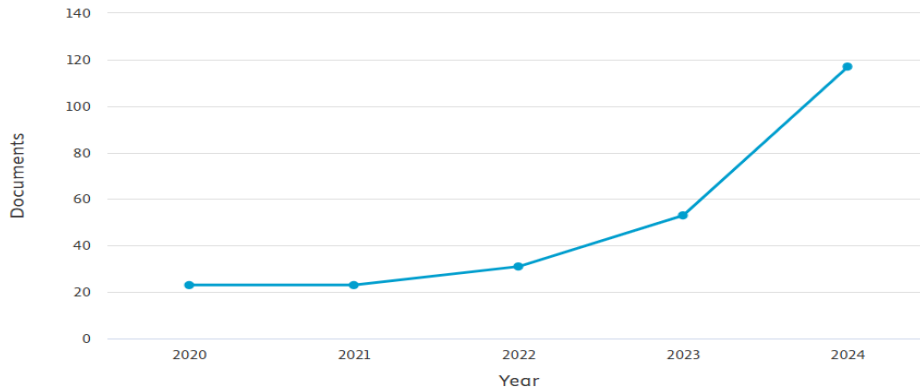
Langkah awal penelitian, penulis memfokuskan database Scopus sebagai pencarian dan penelusuran artikel. Tanggal pencarian artikel tanggal 16 Desember 2025. Berikutnya, penulis menentukan kata kunci yang digunakan yaitu "*digital governance*". Selanjutnya, penulis menentukan kriteria inklusi dan eksklusi pada artikel yang terjaring. Penelitian ini membatasi artikel berbahasa Inggris pada bidang *social sciences* dan menggunakan kata kunci "*digital governance*" untuk menegaskan fokus konseptual tata kelola digital.

Gambar 1 menunjukkan adanya penjaringan awal artikel sejumlah 1.628 dokumen, kemudian penulis memfilter tahun terbit dari tahun 2020 s.d. 2024, dan terjaring sejumlah 799 dokumenn. Berikutnya, penulis melakukan kriteria sebagai berikut, TITLE-ABS-KEY ("*DIGITAL GOVERNANCE*") AND (LIMIT-TO (PUBYEAR , 2020) OR LIMIT TO (PUBYEAR , 2021) OR LIMIT-TO (PUBYEAR , 2022) OR LIMIT-TO (PUBYEAR , 2023) OR LIMIT-TO (PUBYEAR , 2024)) AND (LIMIT-TO (LANGUAGE , "English")) AND (LIMIT-TO (SRCTYPE , "j")) AND (LIMIT-TO (DOCTYPE , "ar")) AND (LIMIT-TO (SUBJAREA , "SOCI")), dan terjaring sejumlah 247 dokumen. Jumlah artikel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 247 dokumen, yang bersumber dari artikel jurnal, artikel hanya berbahasa inggris, dan artikel dibatasi pada subjek social sciences. Selanjutnya, penulis melakukan penyimpanan dokumen artikel tersebut ke dalam file ris/csv, dan dilakukan analisis menggunakan aplikasi VosViewer 1.6.20.

3. Hasil dan Pembahasan

1. Tren Publikasi

Penelitian “*digital governance*” selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Gambar di bawah ini menunjukkan adanya tren peningkatan tersebut.



Sumber: Scopus, 2025

Gambar 2. Tren Publikasi “*Digital governance*” Tahun 2020 s.d. 2024

Gambar 2. menunjukkan bahwa pada tahun 2020 merupakan tahun yang paling sedikit mempublikasikan “*digital governance*” yaitu sejumlah 23 artikel. Diikuti oleh sebanyak 23 artikel terpublikasi pada tahun 2021, dan 31 artikel pada tahun 2022. Pada tahun 2023, mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sejumlah 53 artikel publikasi, dan publikasi terbanyak terjadi pada tahun 2024 yaitu sejumlah 117 artikel. Berikutnya, tren publikasi juga dapat digambarkan melalui jumlah sitasi artikel/dokumen penelitian, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1. Jumlah Sitasi Dokumen Penelitian

No.	Judul Dokumen	Tahun	Media Publikasi	Jumlah Sitasi
1	Artificial intelligence and effective governance: A review, critique and research agenda	2020	Sustainable Futures	188
2	The value of Big Data in government: The case of ‘smart cities’	2020	Big Data and Society	110
3	Leadership in, of, and for smart cities–case studies	2020	Public Management Review	89

	from Europe, America, and Australia			
4	Platform urbanism and the Chinese smart city: the co-production and territorialisation of Hangzhou City Brain	2022	Geojournal	70
5	The moon, the ghetto and artificial intelligence: Reducing systemic racism in computational algorithms	2022	Government Information Quarterly	70
6	From digital government to <i>digital governance</i> : Are we there yet?	2020	Sustainability Switzerland	69
7	An Empirical Assessment of the Intrusiveness and Reasonableness of Emerging Work Surveillance Technologies in the Public Sector	2020	Public Administration Review	66
8	Can Robots Understand Welfare? Exploring Machine Bureaucracies in Welfare-to-Work	2022	Journal of Social Policy	63
9	Citizen engagement and co-production of e-government services in China	2020	Journal of Chinese Governance	61
10	Framing Agri-Digital governance: Industry Stakeholders, Technological Frames and Smart Farming Implementation	2020	Sociologia Ruralis	60

Sumber: Scopus, diolah penulis (2025)

Berdasarkan 247 dokumen publikasi terkait “*digital governance*”, terdapat sitasi tertinggi pada sepuluh dokumen penelitian. Tabel tersebut menunjukkan bahwa dokumen publikasi dengan sitasi tertinggi berjudul *Artificial intelligence and effective governance: A review, critique and research agenda* yang terbit pada tahun 2020, dengan sitasi sejumlah 188, dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan AI di sektor pemerintahan, mengidentifikasi kesenjangan penelitian terutama di bidang kesehatan, TIK, pendidikan, layanan sosial-budaya, serta

menyajikan kerangka kerja untuk mendukung pengembangan tata kelola digital (Sharma dkk., 2020). Berikutnya, artikel dengan judul *The value of Big Data in government: The case of 'smart cities'* sejumlah 110, dan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya keuntungan dari Big Data yang diterapkan dalam pelayanan dan perumusan suatu kebijakan (Löfgren & Webster, 2020). Artikel berikutnya menempati urutan ketiga, dengan jumlah sitasi 89, dengan hasil penelitian yang mengidentifikasi empat mode kepemimpinan kota cerdas di berbagai wilayah dunia, yang tercermin melalui pendekatan digital dalam pemerintahan, pertumbuhan ekonomi, inovasi sosial-politik, dan ekonomi digital (Sancino & Hudson, 2020).

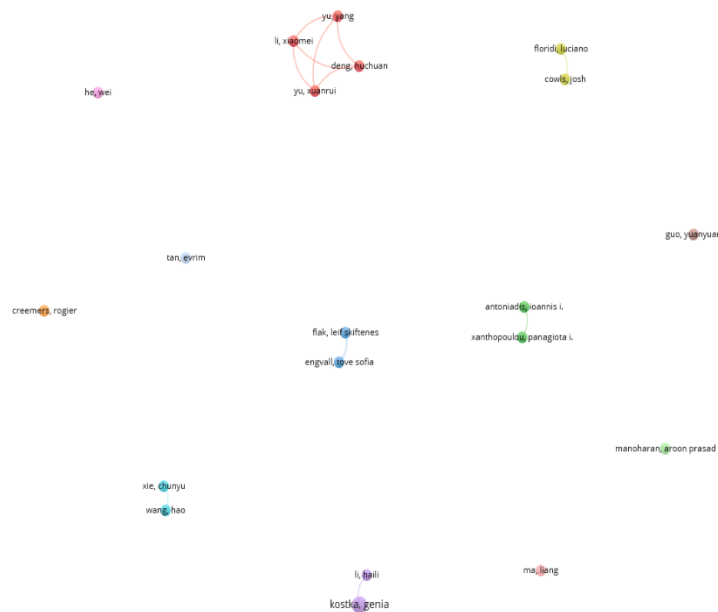
Artikel *Citizen engagement and co-production of e-government services in China*, dengan 60 sitasi, dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kolaborasi masyarakat dalam melaporkan kesalahan pada situs web pemerintah Tiongkok dipengaruhi oleh tingkat administrasi, karakteristik pengguna, dan faktor kontekstual seperti ukuran populasi dan akses internet (Ma & Wu, 2020). Sitasi kesepuluh adalah artikel berjudul *Framing Agri-Digital governance: Industry Stakeholders, Technological Frames and Smart Farming Implementation*, dengan 60 sitasi, dan hasil penelitian menunjukkan bagaimana cara berpikir dan pendekatan teknologi yang berbeda-beda dari petani skala menengah di Australia memengaruhi penerapan pertanian cerdas, dan menunjukkan bahwa perbedaan serta perubahan cara berpikir tersebut bisa membatasi kemampuan petani dalam mengendalikan dan memanfaatkan teknologi secara maksimal (Higgins & Bryant, 2020)

Tabel tersebut menunjukkan keunikan yaitu hanya dua periode tahun publikasi yang memiliki sitasi tertinggi, yaitu tahun 2020 dan tahun 2022. Salah satu faktor penentu suatu artikel di-sitasi, adalah faktor yang bergantung pada waktu (*time depends factors*), sebagaimana yang disampaikan oleh Bornmann & Daniel (2008). Lebih lanjut Bornmann & Daniel (2008), menyatakan bahwa pertumbuhan jumlah publikasi ilmiah dari waktu ke waktu dapat menyebabkan peluang peningkatan sitasi bagi suatu artikel. Fenomena tingginya sitasi pada publikasi tahun 2020 dan 2022 dapat dijelaskan melalui faktor waktu dan relevansi tematik.

Artikel pada tahun 2020, memiliki cukup waktu untuk mengalami akumulasi, karena artikel ilmiah tersebut mencapai puncak sitasi beberapa tahun setelah terbit/terpublikasi. Sedangkan publikasi tahun 2022, memperoleh sitasi terbanyak, karena topik “*digital governance*” pasca pandemi telah menjadi focus/issue global, sehingga artikel-artikel tersebut menawarkan analisis baru yang secara langsung dapat memperoleh perhatian luas dalam komunitas akademik.

2. Peta Hubungan antar Penulis berdasarkan *Co-authorship*

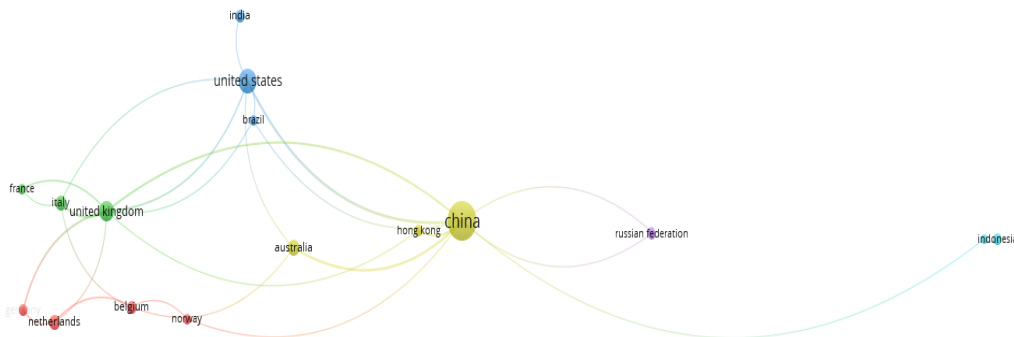
Analisis hubungan antar penulis berdasarkan *Co-authorship*, dilakukan menggunakan aplikasi VosViewer. Dalam VOSviewer, unit analisis yang disebut sebagai item merujuk pada objek penelitian yang dapat berupa publikasi, penulis, maupun kata kunci yang muncul dalam artikel (Van Eck & Waltman, 2019). Penulis menguraikan lebih lanjut hubungan antar penulis dan negara afiliasinya, berdasarkan uraian berikut.



Sumber: Vosviewer diolah penulis, 2025

Gambar 3. Visualisasi Hubungan antar Penulis

Gambar 3. menunjukkan visualisasi hubungan antar penulis berdasarkan *Co-authorship*. Merujuk gambar tersebut, terlihat bahwa item hubungan antar penulis dikategorikan ke dalam 12 cluster. Pembagian cluster terbentuk dari sekelompok penulis yang memiliki keterkaitan karena setidaknya pernah berkolaborasi dalam satu publikasi. Dari keseluruhan klaster yang teridentifikasi, terdapat satu klaster yang memuat jumlah penulis paling besar, yaitu sebanyak 4 orang dalam satu klaster, 2 penulis dalam empat klaster, dan enam klaster mendominasi satu orang penulis.



Sumber: Vosviewer diolah penulis, 2025

Gambar 4. Visualisasi Hubungan antar Penulis berdasarkan Negara Afiliasi

Gambar 4. menunjukkan visualisasi hubungan antar penulis berdasarkan negara afiliasi penulis berasal. Merujuk pada gambar, dapat diketahui bahwa publikasi dokumen penelitian “*digital governance*” didominasi oleh penulis yang berasal dari negara China, sedangkan penulis yang berasal dari negara Indonesia belum banyak mendominasi. Penjabaran hasil visualisasi tersebut dapat dilihat dari jumlah dokumen yang terpublikasi, dan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Jumlah Dokumen berdasarkan Negara Afiliasi dan Total “*Link Strength*”

No.	Negara	Dokumen	Total <i>Link Strength</i> /Kekuatan Jaringan
1	China	80	21
2	United Kingdom	21	16
3	United States	31	11
4	Australia	13	6
5	Italy	12	6
6	Belgium	9	5
7	Germany	8	5
8	Hongkong	7	5
9	Netherlands	11	5
10	Brazil	6	3
11	France	6	3
12	Malaysia	5	2
13	Norway	6	2
14	Russian Federation	6	2
15	South Korea	5	2
16	India	9	1
17	Indonesia	8	1

Sumber: Vos Viewer, diolah Penulis (2025)

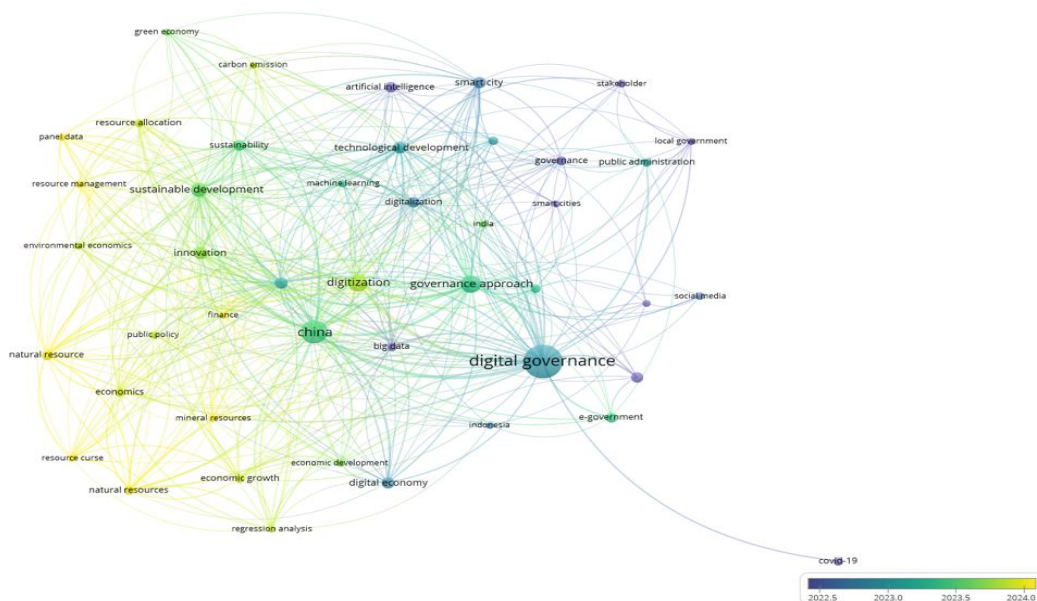
Total *Link Strength* menunjukkan tingkat intensitas keterhubungan suatu item dengan item lain dalam jaringan penelitian (Iqbal, dkk., 2024). Tabel di atas menunjukkan bahwa penulis yang berasal dari negara China merupakan negara terbanyak mempublikasikan “*digital governance*”, dengan 80 dokumen. Diikuti, penulis dari negara United States, United Kingdom, Australia, dan Italy, sejumlah masing-masing 21, 31, 13, dan 12 dokumen. Adapun, penulis yang berasal dari negara Indonesia baru mempublikasikan delapan dokumen, dengan kekuatan jaringan sejumlah 1. Artinya keterhubungan penulis Indonesia dalam jaringan kolaborasi internasional masih sangat rendah. Peran penulis yang berasal dari negara Indonesia dalam penelitian “*digital governance*” relative kecil dan belum menjadi simpul penting/strategis dalam peta bibliometrik. Hal tersebut dapat menjadi perhatian, karena Indonesia sejak lama telah mengadopsi dan mengembangkan berbagai inisiatif *digital governance*, namun kontribusinya dalam

3. Peta Hubungan tema pada Co-Occurrence

[illegible]

Gambar 5. Visualisasi Co-Occurrence berdasarkan Kata Kunci

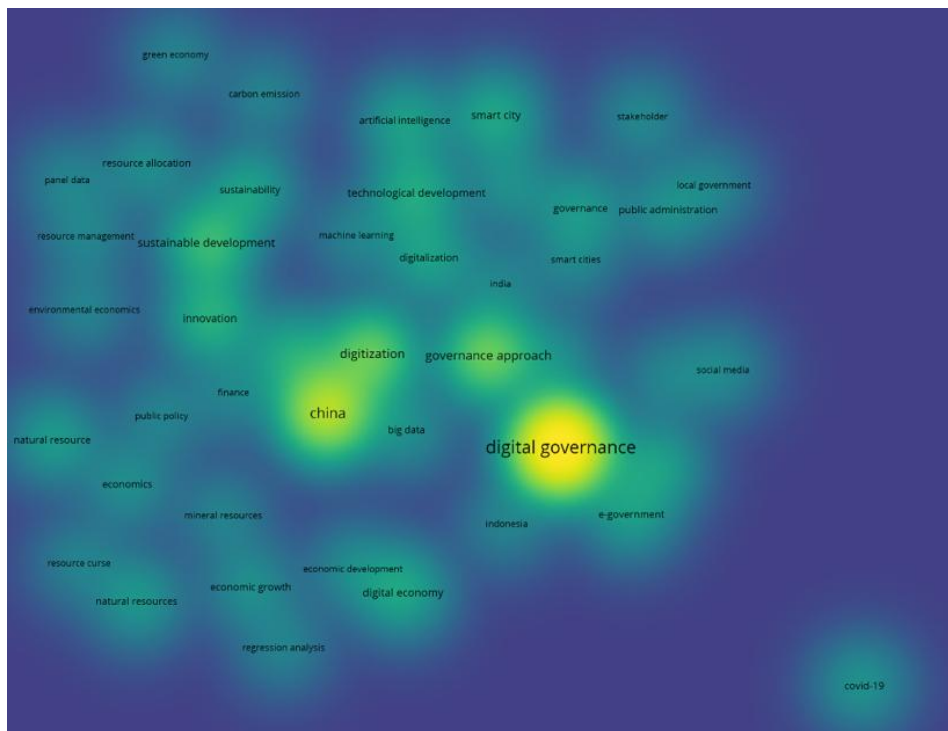
Visualisasi pada gambar 5. menunjukkan adanya berbagai topik “*digital governance*”, yang terbagi ke dalam enam klaster. Klaster pertama terdiri dari 17 *items*, yaitu *accountability, digital transformation, digitalization, e-government, governance, governance approach, government, India, Indonesia, information and communication, local government, public administration, smart cities, smart city, social media stakeholder, technological development*. Klaster kedua terdiri dari sepuluh *items*, meliputi *digital economy, economic development, economic growth, economics, mineral resources, natural resource, natural resources, public policy, regression analysis, resource curse*. Klaster tiga meliputi 10 *items*, yaitu *digital government, environmental economics, finance, innovation, machine learning, panel data, resource allocation, resource management, sustainability, sustainable development*. Klaster empat meliputi empat *items*, yaitu *artificial intelligence, carbon emission, china, green economy*. Klaster lima meliputi dua *items* yaitu covid-19 dan *digital governance*. Klaster enam meliputi dua *items* yaitu *big data dan digitization*. Vos Viewer dapat menyajikan pemetaan *items* berdasarkan tahun publikasi. Berkaitan dengan publikasi “*digital governance*”, dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Vos Viewer, diolah penulis (2025)

Gambar 6. Visualisasi Co-Occurrence “*Digital governance*” berdsarkan Tahun Publikasi

Merujuk pada gambar 6. dapat diketahui bahwa *digital governance*, *China*, *governance approach*, *sustainable development*, *sustainability*, dan *innovation*, merupakan item yang paling banyak dikaji dalam publikasi. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin besarnya bulatan item pada tampilan visualisasi di atas. Adapun, bila dilihat dari warna tampilannya, item *big data*, *local government*, dan *digital transformation* merupakan item yang lebih dahulu dikaji, yaitu pada tahun 2022. Sementara item yang paling baru dikaji, pada tahun 2024, yaitu item *finance*, *natural resource*, *resource curse*, dan *resource management*. Visualisasi tersebut menunjukkan adanya pergeseran fokus penelitian ke arah isu-isu baru yang mengaitkan *digital governance* dengan pengelolaan sumber daya dan ekonomi publik. Pola tersebut menggambarkan bahwa *digital governance* tidak hanya mengkaji aspek teknologi, tetapi juga memperluas analisisnya ke dimensi ekonomi, lingkungan, dan tata kelola yang lebih luas.



Sumber: Vos Viewer, diolah penulis (2025)

Gambar 7. Visualisasi Density Publikasi *Digital governance*

Gambar 7. merupakan tampilan density yang menggambarkan kejenuhan topik dari publikasi *digital governance*. Adapun, topik yang paling jenuh adalah topik

dengan bulatan warna paling terang yaitu topik *digital governance*. Kedekatannya dengan kata kunci “China”, “*governance approach*,” “*innovation*,” dan “*sustainable development*” mengindikasikan bahwa tema-tema tersebut menjadi fokus dominan dalam literatur dan membentuk klaster konseptual inti studi tata kelola digital. Sementara itu, topik *big data*, *local government*, dan *digital transformation*, menunjukkan bahwa topik yang telah lama dibahas tetapi tidak sekuat tema inti sebelumnya. Adapun kemunculan kata kunci seperti *finance*, *resource curse* dan *resource management*, pada area warna yang lebih muda menggambarkan topik yang lebih baru dan mulai mendapatkan perhatian. Kemunculan kata tersebut merefleksikan respons akademik terhadap tekanan global pascapandemi dan agenda kebijakan terkait akuntabilitas fiskal dan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, dapat diinformasikan bahwa telah terjadi pergeseran penelitian menuju isu multidisipliner yang menghubungkan tata kelola digital dengan aspek ekonomi, keberlanjutan, dan aspek sumber daya alam. Oleh karena itu, peluang penelitian masa depan dapat mengisi celah tersebut, bahwa dapat mengeksplorasi hubungan antara tata kelola digital dan isu-isu multidisipliner yang mulai muncul, seperti pengelolaan sumber daya, keberlanjutan, serta dinamika ekonomi digital yang terus berkembang. Pada praktiknya di Indonesia, dapat mengkaji penelitian yang mengintegrasikan tata kelola digital dengan isu strategis energi terbarukan, mitigasi bencana alam, atau pengelolaan perikanan dan pertanian. Kebaruan penelitian ini secara empiris memperkaya khazanah keilmuan *digital governance* dengan menyajikan pemetaan penelitian, dan berbeda dari penelitian terdahulu yang cenderung berfokus pada aspek praktis atau studi kasus implementasi, karena penelitian ini menegaskan adanya pergeseran tematik dan struktur pengetahuan riset berbasis pemetaan bibliometrik yang sistematis dan komprehensif.

4. Kesimpulan

Kesimpulannya bahwa publikasi “*digital governance*” mengalami peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir, yang dapat dilihat dari adanya peningkatan jumlah artikel terbanyak pada tahun 2024. Publikasi dengan sitasi tertinggi

didominasi oleh artikel pada tahun 2020 dan 2022, yang dipengaruhi oleh faktor waktu publikasi dan relevansi tematik pascapandemi. Publikasi paling banyak didominasi oleh penulis yang berasal dari negara China, sedangkan penulis dari asal negara Indonesia masih minim memberikan kontribusi ilmiah terkait *digital governance*. Visualisasi *co-occurrence* menunjukkan bahwa tema *digital governance* terkonsentrasi pada isu inti seperti *governance approach*, *innovation*, dan *sustainable development*, dengan munculnya topik baru terkait ekonomi sumber daya, *resource management*, serta *green economy*. Analisis *density* memperlihatkan pergeseran orientasi riset menuju isu multidisipliner yang mengintegrasikan tata kelola digital dengan lingkungan, ekonomi publik, dan pengelolaan sumber daya. Penelitian ini menegaskan adanya perkembangan penelitian *digital governance* menuju kerangka yang lebih luas dan kompleks, dan membuka peluang penelitian masa depan memperkuat kontribusi akademik Indonesia dalam percakapan ilmiah global mengenai transformasi digital pemerintahan. Penelitian selanjutnya disarankan menelaah secara empiris hubungan *digital governance* dengan tata kelola keuangan, sementara kebijakan di Indonesia perlu mengintegrasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan sistem pengelolaan anggaran berbasis data. Penelitian ini berkontribusi secara empiris dengan memperkaya pemahaman riset *digital governance* melalui pemetaan bibliometrik yang sistematis, melengkapi kajian terdahulu yang umumnya bersifat praktis atau implementatif. Adapun keterbatasan penelitian ini adalah hanya menggunakan satu database akademik. Disarankan penelitian bibliometrik selanjutnya menggunakan lebih dari satu database akademik.

5. Daftar Pustaka

- Aminah, S., & Saksono, H. (2021). Digital Transformation Of The Government: A Case Study In Indonesia. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*. <https://doi.org/https://doi.org/10.17576/jkmjc-2021-3702-17>
- Bharadwaj, A., El Sawy, O. A., Pavlou, P. A., & N, V. (2013). Digital business strategy: Toward a next generation of insights. *MIS Quarterly: Management Information*

- Systems*. <https://doi.org/10.25300/MISQ/2013/37:2.3>
- Bornmann, L., & Daniel, H.-D. (2008). What Do Citation Counts Measure? A Review Of Studies On Citing Behavior. *Journal of Documentation*. <https://doi.org/10.1108/00220410810844150>
- Hanisch, M., Goldsby, C. M., Fabian, N. E., & Oehmichen, J. (2023). *Digital governance: A conceptual framework and research agenda*. *Journal of Business Research*, 162. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.113777>
- Higgins, V., & Bryant, M. (2020). Framing Agri-Digital governance: Industry Stakeholders, Technological Frames and Smart Farming Implementation. *Sociologia Ruralis*. <https://doi.org/10.1111/soru.12297>
- Iqbal, M., Anwar, N., & Budhisantosa, N. (2024). Analisa Bibliometrik Visualisasi Publikasi Bidang Ilmu Komputer Era Periode 2016 – 2020. *JIK: Jurnal Ilmu Komputer*, 09(1). <https://doi.org/10.47007/komp.v7i01.xxxxxx>
- Kencono, B. D., Putri, H. H., & Handoko, T. W. (2024). Transformasi Pemerintahan Digital: Tantangan dalam Perkembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia. *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 7(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3519>
- Kennedy, A., Surya, W. H., & Wartoyo, F. X. (2024). Tantangan dan Solusi Penerapan E-Government di Indonesia. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 4(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jtpm.v4i2.4459>
- Khan, A., Goodell, J. W., Hassan, M. K., & Paltrinieri, A. (2022). A Bibliometric Review Of Finance Bibliometric Papers. *Finance Research Letters*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1544612321004876>
- Löfgren, K., & Webster, C. W. R. (2020). The Value Of Big Data In Government: The Case Of ‘Smart Cities.’ *Big Data and Society*. <https://doi.org/10.1177/2053951720912775>
- Ma, L., & Wu, X. (2020). Citizen Engagement And Co-Production Of E-Government Services In China. *Journal of Chinese Governance*. <https://doi.org/10.1080/23812346.2019.1705052>
- Melyan, N. R., & Yasin, M. R. (2024). Analisis co-occurrence pada riset pengembangan

- koleksi perpustakaan tahun 2015-2023: studi visualisasi dengan VOSviewer. *Al-Kuttab: Jurnal Kajian Perpustakaan, Informasi Dan Kearsipan*, 6(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.24952/ktb.v6i2.11551>
- Van Eck, N. J., & Waltman, L. (2019). *VOSviewer Manual*.
https://www.vosviewer.com/documentation/Manual_VOSviewer_1.6.13.pdf
- Riswati. (2021). Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Digitalisasi Teknologi Di Indonesia. *Jurnal Media Birokrasi*, 3(2).
<https://doi.org/10.33701/jmb.v3i2.2474>
- Sancino, A., & Hudson, L. (2020). Leadership In, Of, And For Smart Cities–Case Studies From Europe, America, And Australia. *Public Management Review*.
<https://doi.org/10.1080/14719037.2020.1718189>
- Setyawati, D. N., & Fitriati, R. (2023). *Digital governance* Dalam Keterbukaan Informasi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.31258/jkp.v14i1.8217>
- Sharma, G. D., Yadav, A., & Chopra, R. (2020). Artificial intelligence and effective governance: A review, critique and research agenda. *Sustainable Futures*.
<https://doi.org/10.1016/j.sftr.2019.100004>
- Wagola, R., Nurmandi, A., Misran, & Subekti, D. (2023). Government Digital Transformation in Indonesia. *Communications in Computer and Information Science*. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-031-36001-5_37



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).